



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pungutan atas penggantian biaya cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan adalah merupakan jenis pungutan Provinsi;
- b. bahwa pelayanan jasa ketatausahaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

GOVERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat .
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
9. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenis yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas lokasi/wilayah tertentu
10. Pelayanan Jasa Ketatausahaan adalah pelayanan yang diberikan oleh aparat/petugas pada pihak-pihak yang membutuhkan cetak peta, surat-surat/dokumen tertentu yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Perintah Provinsi.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan peta dan pelayanan jasa ketatausahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Jasa Ketatausahaan yang meliputi penyediaan dan pemberian :

- a. Pencetakan Peta : seperti peta dasar, peta digital, peta tematik dan peta teknis
- b. Blanko, formulir, rekomendasi dan surat keterangan
- c. Legalisasi Surat-surat.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang wajib melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah lembaran penggantian biaya cetak peta dan dokumen yang diterima oleh Wajib Retribusi.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan penggantian sebagian biaya cetak peta, legalisasi dan dokumen ketatausahaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PUNGUT

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di daerah tempat pelayanan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

PASAL 10

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
- (2) Retribusi yang dipungut dengan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) untuk Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan ;
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditempelkan pada dokumen administrasi yang merupakan bukti adanya pelayanan Retribusi Jasa Ketatausahaan ;
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana pada ayat (3) adalah pemberian Blanko, Formulir atau barang cetakan lainnya, Surat izin, Rekomendasi, dan Surat-surat Keterangan, Pengesahan Peta yang terkait dengan Perencanaan dan Jasa Ketatausahaan lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (5) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat diborongkan.

BAB IX TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) diadakan/disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas pemungutan, setiap SKPD/UPTD pengelola pungutan mengajukan permintaan jumlah tanda Pembayaran Retribusi (TPR) sesuai dengan kebutuhan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tak langsung.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Desember 2009

GOVERNOR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

G.CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 38

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA
DAN PELAYANAN JASA KETATA USAHAAN

I. UMUM

Retribusi penggantian biaya cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan merupakan jenis pungutan Provinsi yang digolongkan retribusi jasa umum. Penggantian biaya cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan merupakan pembayaran atas setiap penerbitan peta yang diberikan oleh aparat/petugas kepada pihak-pihak yang membutuhkan peta dan surat-surat dokumen tertentu yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi baik cetak peta maupun jasa ketatausahaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan yang berkaitan atau dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas

Ayat (1)

Bahwa TPR sebagaimana memiliki Spesifikasi Teknis sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Bahan Baku | : | Sticker Security Paper (dirancang hanya untuk TPR) |
| b. | Bentuk dan Ukuran | : | bentuk empat persegi panjang dan ukuran menyesuaikan sesuai kebutuhan. |
| c. | Penomoran | : | Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) memuat Nomor kode seri barang cetakan berharga dan nomor urut penerbitan. |
| d. | Desain | : | a. pada bagian atas berbentuk TPR ditulis PERDA No. Tahun 2009 |

- b. pada bagian tengah sticker terdapat latar belakang tulisan Retribusi Pembayaran

Jasa Ketatausahaan (PRJK) yang ditimpa dengan nilai nominal Tanda Pembayaran Rtribusi (TPR)

- c. pada sebelah kiri atas terdapat lambang Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 38

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor : 8 TAHUN 2009
Tanggal : 2 Desember 2009

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

I. PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN LEGALISASI

INSTANSI PENGELOLA	JENIS PETA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Setiap SKPD/ UPTD	Skala 1 : 1.000.000	1.000.000	Per peta
	Skala 1 : 750.000	750.000	Per peta
	Skala 1 : 500.000	500.000	Per peta
	Skala 1 : 250.000	400.000	Per peta
	Skala 1 : 100.000	250.000	Per peta
	Skala 1 : 50.000	200.000	Per peta
	Skala 1 : 20.000	175.000	Per peta
	Skala 1 : 10.000	150.000	Per peta
	Skala 1 : < 5.000	125.000	Per peta

II. PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

SKPD PENGELOLA	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A. DISPENDA	1. 1. BLANGKO/ FORMULIR : <div> a. Formulir Fiskal Daerah b. Formulir Permohonan Keringanan Pengurangan dan pembebasan Pajak : </div>	10.000	Per surat

B. UPTD BALAI BENIH INDUK (BBI)	- kendaraan bermotor roda dua	15.000	Per surat
	- kendaraan bermotor roda empat	25.000	Per surat
	- kendaraan bermotor roda enam ke atas	50.000	Per surat
	c. Formulir Pendaftaran :		
	- kendaraan bermotor roda dua	7.000	Per surat
	- kendaraan bermotor roda empat	10.000	Per surat
	- kendaraan bermotor roda enam ke atas/alat berat	25.000	Per surat
	d. Formulir Permohonan Fiskal antar Kabupaten :		
	- kendaraan bermotor roda dua	20.000	Per surat
	- kendaraan bermotor roda empat	25.000	Per surat
	- kendaraan bermotor roda enam ke atas/alat berat	50.000	Per surat
	2. REKOMENDASI (utk - Dunia Usaha)	500.000	Per surat
	3. SURAT IJIN	250.000	Per surat
	1. Komoditi Benih Padi		
	a. Penerimaan Benih Pokok	8.750.000	Dokumen
	b. Penerimaan Benih Sebar	6.250.000	Dokumen
	2. Komoditas Benih Kedelai		
	a. Penerimaan Benih Pokok	6.000.000	Dokumen
	b. Penerimaan Benih Sebar	4.200.000	Dokumen
	3. Komoditas Benih Jagung		
	a. Penerimaan Benih Pokok	16.000.000	Dokumen
	b. Penerimaan Benih Sebar	8.750.000	Dokumen
	4. Komoditas Bibit		
	a. Komoditas Bibit Jagung	2.500.000	Dokumen
	b. Komoditas Bibit Durian	15.000.000	Dokumen
	c. Komoditas Bibit Rambutan	5.000.000	Dokumen
	d. Komoditas Bibit Manggis	15.000.000	Dokumen
	5. Kultur Jaringan		
	a. Bunga	2.000.000	Dokumen
	b. Buah-buahan	2.000.000	Dokumen

INSTANSI PENGELOLA	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
C. BALAI PENGAWASAN SERTIFIKASI BENIH	PENGUJIAN & PEMERIKSAAN LAPANGAN		
	a. Padi Hibrida/Non Hibrid	10.000	Per hektar
	- Pemeriksaan Lapangan	10.	Perkilogram
	- Pengujian Benih	10.000	Per cth Benih
	- Pengujian Ulang	10.000	Percontohan
	- Pengujian Benih Untuk Laporan Khusus	2.500	Perlembar
	- Pemasangan Label		
	b. Jagung Hibrida/Bersari Bebas		
	- Pemeriksaan Lapangan	7.000	Per hektar
	- Pengujian Benih	10.	Perkilogram
	- Pengujian Ulang	10.000	Per cth Benih
	- Pengujian Keperluan Khusus jagung Hibrida		Percontohan
	- Pemasangan Label	2.500	Perlembar
	c. Kacang Tanah		
	- Pemeriksaan Lapangan	5.000	Per hektar
	- Pengujian Benih	10.	Perkilogram
	- Pengujian Ulang	10.000	Per cth Benih
	- Pengujian untuk Keperluan Khusus	10.000	Percontohan
	- Pemasangan Label	2.500	Perlembar
	d. Kedele		
	- Pemeriksaan Lapangan	5.000	Per hektar
	- Pengujian Benih	10.	Perkilogram
	- Pengujian Ulang	10.000	Per cth Benih
	- Pengujian Keperluan Khusus	10.000	Percontohan
	- Pemasangan Label	2.500	Perlembar
	e. Kacang Hijau		
	- Pemeriksaan Lapangan	5.000	Per hektar
	- Pengujian Benih	10.	Perkilogram
	- Pengujian Ulang	10.000	Per cth Benih
	- Pengujian Keperluan Khusus	10.000	Percontohan
	- Pemasangan Label	2.500	perlembar

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

